



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU**

**LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2022**

Nomor : LGIAT-09/P3A/2022

Tanggal : 6 April 2022

DAFTAR ISI

1. Pencapaian Target <i>Outcome</i> Sesuai Perjanjian Kinerja	1
a. Pengawasan	1
b. Pendukung Pengawasan	4
2. Pencapaian Target <i>Output</i> Pengawasan	4
3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)	4
a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir	4
b. PKPT yang Direncanakan pada Tahun Berjalan	5
c. PKPT Generik	5
4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)	5
5. Penggunaan Hari Produktif	5
6. Penyerapan Anggaran Pengawasan	5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Capaian <i>Outcome</i> Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Lampiran 2a	Target dan Realisasi <i>Output</i> Pengawasan Berdasarkan Topik
Lampiran 2b	Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit Berdasarkan PKPT
Lampiran 2c	Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit Berdasarkan Bidang
Lampiran 3	Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Lampiran 4	Realisasi Hari Produktif
Lampiran 5	Realisasi Penyerapan Anggaran Pengawasan

Nomor : LGIAT-09/P3A/2022
Lampiran : Satu Set
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

6 April 2022

Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
di Ambon

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku sampai dengan triwulan I tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja tahun 2022, sebanyak 10 (sepuluh) IKP terealisasi sampai dengan triwulan I tahun 2022, dan capaian kinerja IKP selama triwulan I tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) IKP: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah
Sampai dengan triwulan I tahun 2022, nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp391.228.785.862,00. Dengan demikian capaian IKP nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah sebesar 253,24% dari target tahun 2022 sebesar Rp154.487.000.000,00. Tidak terdapat hambatan pencapaian target IKP.
- 2) IKP: Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan
PKPT tahun 2022 menetapkan 1 PP hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan. Sampai dengan triwulan I tahun 2022 telah dilaksanakan 2 PP, dengan demikian capaian IKP "Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang diselesaikan" sebesar 100% atau terealisasi 117,65% dari target tahun 2022 sebesar 85%.
- 3) IKP: Jumlah BUMDesa yang Mampu Menyusun Laporan
Capaian IKP jumlah BUMDesa yang mampu menyusun laporan sampai dengan triwulan I tahun 2022 adalah sebanyak 21 BUMDesa (kumulatif sampai dengan tahun 2022) dari target sebanyak 35 BUMDesa, atau mencapai 60% dari target. Belum tercapainya target IKP tersebut disebabkan belum dilakukannya bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas pengelolaan

keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Direncanakan akan dilakukan bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon dengan menggunakan aplikasi SIA BUMDesa pada triwulan II tahun 2022.

- 4) IKP: Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Realisasi capaian IKP persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sampai dengan triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target sebesar 80%, atau terealisasi sebesar 125% dari target tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dengan telah dimanfaatkannya/ditindaklanjutinya hasil pengawasan preventif dan edukatif atas 1 penugasan yang telah dilakukan.

- 5) IKP: Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP Level 3

Sampai dengan triwulan I tahun 2022, realisasi IKP jumlah APIP kabupaten/kota dengan kapabilitas APIP level 3, secara kumulatif sebanyak 1 pemda dari target sebanyak 4 pemda, atau 25% dari target tahun 2022. Hal ini disebabkan belum dilakukannya penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh APIP kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku. Penilaian mandiri tersebut direncanakan akan dilakukan pada triwulan II tahun 2022.

- 6) IKP: Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

Sampai dengan triwulan I tahun 2022, realisasi IKP jumlah provinsi dengan maturitas SPIP level 3 adalah sebanyak 1 provinsi dari target sebanyak 1 provinsi, atau 100% dari target tahun 2022.

- 7) IKP: Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

Sampai dengan triwulan I tahun 2022, realisasi IKP jumlah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP level 3 adalah sebanyak 4 kabupaten/kota dari target sebanyak 6 Kabupaten/Kota, atau sebesar 66,67% dari target tahun 2022. Hambatan pencapaian target IKP tersebut, antara lain:

- a. Belum berperannya fungsi tim satgas SPIP yang telah dibentuk dalam upaya peningkatan level maturitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah;

- b. Kurangnya upaya penyebarluasan dan penyegaran kembali pemahaman pengendalian internal yang memadai secara internal oleh tim satgas SPIP dan kepala daerah;
 - c. Belum dilaksanakannya penilaian maturitas SPIP secara mandiri (*self assessment*).
- 8) IKP: Persentase Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Sampai dengan triwulan I tahun 2022, realisasi IKP persentase desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebesar 42,5% dari target tahun 2022 sebesar 60%, atau terealisasi 70,83% dari target tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sebanyak 510 desa dari 1200 desa atau sebesar 42,5% di Provinsi Maluku.
- 9) IKP: Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes
- Sampai dengan triwulan I tahun 2022, jumlah APIP yang telah mengimplementasikan siswaskeudes adalah sebanyak 1 dari 4 APIP di Provinsi Maluku yaitu Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian capaian IKP jumlah APIP yang mengimplementasikan siswaskeudes adalah sebesar 25,00% dari target tahun 2022.
- 10) IKP: Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai
- Sampai dengan triwulan I tahun 2022, realisasi IKP jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai adalah sebanyak 19 desa dari target sebanyak 59 desa di Provinsi Maluku, atau terealisasi sebesar 32,20% dari target tahun 2022. Hambatan pencapaian target IKP ini, antara lain:
- a. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban menyusun laporan pengelolaan aset desa secara berkala;
 - b. Belum adanya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait pengelolaan aset desa.

Sedangkan 11 (sebelas) IKP akan dihitung capaiannya pada triwulan-triwulan berikutnya.

b. Pendukung Pengawasan

8 (delapan) Indikator Kinerja Program (IKP) pendukung pengawasan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 akan dihitung capaiannya pada akhir tahun atau triwulan IV tahun 2022.

Rincian target dan realisasi *outcome* sesuai perjanjian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2022 disajikan pada lampiran 1.

2. Pencapaian Target Output Sintesa Hasil Pengawasan (SHP)

Sesuai dengan data RMP dan RPL Topik dalam aplikasi SIMA sampai dengan triwulan I tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku ditargetkan untuk menghasilkan *output* sebanyak 24 Sintesa Hasil Pengawasan (SHP) pada triwulan I tahun 2022.

Realisasi *output* s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak 19 SHP atau 79,17% dari SHP berdasarkan informasi Topik triwulan I tahun 2022. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 14,73% dari rencana *output* sebanyak 129 SHP.

Rincian target dan realisasi output pengawasan berdasarkan topik s.d triwulan I tahun 2022 disajikan pada Lampiran 2a.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir

Realisasi PKPT berdasarkan rencana mulai penugasan (RMP) s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak 29 PKPT atau 87,88% dari rencana PKPT berdasarkan RMP s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak 33 PKPT. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka PKPT awal s.d triwulan I tahun 2022 tercapai 27,36% dari RMP sebanyak 106 PKPT, dengan rincian realisasi penugasan pengawasan sebanyak 57 PP.

Realisasi PKPT berdasarkan rencana penerbitan laporan (RPL) s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak 21 PKPT atau 87,50% dari PKPT berdasarkan RPL s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak 24 PKPT. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah realisasi PKPT s.d triwulan I tahun 2022 tercapai 19,81% dari RPL sebanyak 106 PKPT, dengan adanya surat tugas yang sudah terbit namun belum terbit laporan hasil pengawasannya disebabkan laporan masih dalam proses penyelesaian.

Realisasi PKPT berdasarkan RMP s.d triwulan I tahun 2022 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 29 PKPT atau 100% dari jumlah realisasi PKPT berdasarkan RMP sampai dengan triwulan I tahun 2022, sedangkan realisasi PKPT berdasarkan RPL yang telah di-*entry* sebanyak 13 PKPT atau 61,90% dari jumlah realisasi PKPT berdasarkan RMP sampai dengan triwulan I tahun 2022.

b. PKPT yang Direncanakan pada Tahun Berjalan

Sampai dengan triwulan I tahun 2022, belum ada realisasi PKPT yang direncanakan selama tahun berjalan.

c. PKPT Generik

Realisasi PKPT generik berdasarkan RMP s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak 3 PKPT atau 100% dari RMP sebanyak 3 PKPT. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka PKPT generik s.d triwulan I tahun 2022 tercapai 100% dari RMP s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak 3 PKPT.

Realisasi PKPT generik berdasarkan RPL s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak 2 PKPT atau 100% dari RPL sebanyak 2 PKPT. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka PKPT generik s.d triwulan I tahun 2022 tercapai 66,67% dari RPL s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak 3 PKPT.

Realisasi PKPT generik berdasarkan RMP s.d triwulan I tahun 2022 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 3 PKPT atau 100% dari jumlah realisasi PKPT berdasarkan RMP sampai dengan triwulan I tahun 2022, sedangkan realisasi PKPT generik berdasarkan RPL yang telah di-*entry* sebanyak 2 PKPT atau 100% dari jumlah realisasi PKPT berdasarkan RMP sampai dengan triwulan I tahun 2022.

Rincian pelaksanaan PKPT s.d triwulan I tahun 2022 berdasarkan nama PKPT disajikan pada lampiran 2b, rincian pelaksanaan PKPT berdasarkan bidang pengawasan disajikan dalam lampiran 2c.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)

Realisasi penugasan PKAU s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak 15 PP atau 100% dari rencana s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak 15 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU s.d triwulan I tahun 2022 tercapai 20,27% dari rencana sebanyak 74 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak 14 laporan/dokumen atau 93,33% dari rencana s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak 15 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d triwulan I tahun 2022 tercapai 18,92% dari rencana sebanyak 74 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT dukungan pengawasan s.d triwulan I tahun 2022 disajikan pada lampiran 3.

5. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak 8.677 OH atau 67,39% dari rencana hari pengawasan setahun sebanyak 12.875 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif (total OH PKPT awal + OH PKPT tambahan + OH PKPT generik + OH PKAU) per pegawai s.d triwulan I tahun 2022 sebanyak 8.887 OH atau 62,76% dari rencana setahun sebanyak 14.160 OH.

Rincian realisasi penggunaan hari produktif triwulan I tahun 2022 disajikan pada lampiran 4.

6. Penyerapan Anggaran Pengawasan

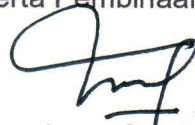
Realisasi anggaran pengawasan s.d triwulan I tahun 2022 sebesar Rp425.695.168,00 atau 11,25% dari anggaran pengawasan setahun sebesar Rp3.783.168.000,00.

Rincian rencana dan realisasi anggaran s.d triwulan I tahun 2022 disajikan pada lampiran 5.

Demikian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku sampai dengan triwulan I tahun 2022 kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Kaper, diucapkan terima kasih.



Mengetahui
Korwas Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan APIP,



Tousiama Orisimus Adoe
NIP 19750408 199502 1 001